Brainy
Volume 2, No. 2, Bulan Desember 2021, Halaman. 18-24
ISSN 2962-4622

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Arini Kurniawati[1], Dadang Sadeli[2]

[1] *Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No.6-8, Bandung 40116 Indonesia*

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi publik terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Metode dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi publik atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan pengujian statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi, koefisien korelasi Pearson, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 51,5% sedangkan sisanya sebesar 48,5% merupakan pengaruh faktor lain di luar ketiga variabel independen seperti standar akuntansi pemerintah. Tata kelola perusahaan yang baik, sistem pengendalian internal

Kata Kunci :
Akuntabilitas Publik, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of public accountability and transparency on the quality of financial statements in local government. This research was conducted at the Regional Work Unit in Bandung with a total sample of 30 respondents. The method in this research is survey method with descriptive and verification approach. To find out public accountability and transparency on the quality of financial statements in local government used statistical testing. Statistical test used is to use regression, Pearson correlation coefficient, hypothesis test and coefficient of determination. The results of this research also shows that simultaneously public accountability and transparency affect the quality of financial statements of 51.5% while the rest of 48.5% is the influence of other factors outside the three independent variables such as government accounting standards. Good coorperate governance, Internal control system

Keywords *:*
Public Accountability, Transparency, quality of financial statements

* *arini18@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak– pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d)membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002).

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakfektifan (Sukmaningrum & Tantriani, 2012) Dalam hal ini, yang paling pokok adalah pertanggungjawaban keuangan yaitu sebagai upaya nyata dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sudah seharusnya menjadi tugas pihak-pihak terkait upaya melaksanakan dan memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilakukan, laporan keuangan daerah yang dibuat memang belum seutuhnya sempurna. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang terampil pada pemerintah daerah dan dibutuhkan sistem dan prosedur yang memadai serta pedoman akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pada beberapa institusi publik di Indonesia masih banyak memiliki kelemahan yang tentunya dapat berimbas pada kualitas dari laporan keuangan yang disajikan. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Nordiawan et al., 2010). Laporan Keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Abdul Hafiz Tanjung, 2014:14).

Pembuatan laporan keuangan daerah adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Adanya pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaannya sehingga dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi dapat menciptakan laporan keuangan berkualitas baik di pemerintah pusat maupun daerah (Darwanis et al., 2016)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Ayu Wulandari, 2014) dan (Rachmawaty & Dinie, 2015) yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian berdasarkan fakta teoritis dan empiris, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan selesai.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut (Mahmudi, 2013) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : "Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat."Definisi akuntabilitas publik menurut (Lukito & Penny Kusumastuti, 2014) adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas dalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya."

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggung jawabannya kepada publik.

Transparansi

Transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.Transparansi menurut (Mardiasmo, 2009) adalah sebagai berikut:"Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat."

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan dan informasi tentangkebijakan yang diambil dan hasil-hasil yang telah dicapai yang dapat diketahui publik.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, (Mardiasmo, 2009) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna yang membutuhkan maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas adalah suatu keadaan terbaik dalam batas-batas kondisi tertentu sesuai dengan keinginan. Laporan Keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan tertentu.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya (Nordiawan & Deddi, 2008) .Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah; (1)Masyarakat; (2)Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3)Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; (4)Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif yang digunakan peneliti disini adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabel independen dan dependen yaitu variabel akuntabilitas publik, transparansi dan kualitas laporan keuangan. Metode verifikatif yang digunakan peneliti disini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruhakuntabilitas publik dan transparansiterhadap kualitas laporan keuangandidapat dari hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.

Objek penelitian yang akan dijadikan sebagai variabel bebas (*independent variable*) yaitu Akuntabilitas Publik dan Transparansi, sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala bagian akuntansi atau sub.Bagian Akuntansi yang bekerja pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Bandung.Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada Pemerintah Kota Bandung. Untuk mengetahui jumlah SKPD di Pemkot Bandung, penulis mendapatkan informasi tersebut dari *web site* Resmi Pemerintah Kota Bandung dimana pemerintah kota Bandung terdapat SKPD yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Dari keseluruhan populasi sebanyak 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, maka peneliti mengambil sampel

sebanyak (60x50%) = 30 responden Berdasarkan uraian di atas maka sample minimumnya pada penelitian ini berjumlah 30 yang bekerja di bagian akuntansi di setiap SKPD.

Untuk menetukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, penelitia menggunakan teknik *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan data primer. Menurut Sugiyono (2014:403), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer tersebut diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner yang dilakukan kepada Kasubag. Keuangan atau Subag.Keuangan di setiap SKPD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan, maka dilakukan analisis korelasi, pengujian hipotesis dan penilaian koefisien determinasi dengan menggunakan alat bantu pengolah data SPSS 23 *for Windows*.

Hasil Penghitungan Koefisien Korelasi

Correlations

		Y	X1
Pearson Correlation	Y	1.000	.677
	X1	.677	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000
	X1	.000	.
N	Y	30	30
	X1	30	30

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi antara akuntabilitas publik dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0,677, artinya korelasi kedua variabel tersebut kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas publik dengan kualitas laporan keuangan adalah searah, artinya semakin baik akuntabilitas publik, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.

Analisis Koefisien Korelasi Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar kedua variabel dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan tersebut digunakan koefisien pearson. Hal ini dilakukan karena data yang digunakan berbentuk skala interval. Untuk mencari koefisien korelasinya, penulis menggunakan SPSS 23,0 *for Windows*.

Hasil Penghitungan Koefisien Korelasi

Correlations

		Y	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.655
	X2	.655	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000
	X2	.000	.
N	Y	30	30
	X2	30	30

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi antara transparansi dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0,655, artinya korelasi kedua variabel tersebut kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi dengan kualitas laporan keuangan adalah searah, artinya semakin baik transparansi, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.

Berikut disajikan hasil analisis korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Nilai Koefisien Korelasi (R)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718[a]	.515	.479	4.485566953

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,718. Nilai tersebut jika diintepretasikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka koefisien korelasi sebesar 0,718 menunjukkan adanyabhubungan yang kuat antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat dengan arah hubungan yang positif (searah).

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah hasil output regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh akuntabilitas publik dan transaparansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	4.452	7.701		.578	.568			
	X1	.360	.165	.425	2.182	.038	.677	.387	.293
	X2	.533	.299	.347	1.785	.085	.655	.325	.239

a.Depent Variable: Y

Tabel koefisien regresi di atas dapat menghasilkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = 4{,}452 + 0{,}360\ X_1 + 0{,}533\ X_2 + \varepsilon_3$

Persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,360 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan jika akuntabilitas publik mengalami peningkatan. Kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,533 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan jika transparansi mengalami peningkatan.

Hasil Uji- F

Pengujian hipótesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan digunakan uji-F. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan angka taraf signifikan hasil perhitungan dengan taraf signifikan 0,05 (5%). Hasil pengujian dengan menggunakan uji F diperoleh nilai sebagaimana pada Tabel 4.26.

Tabel Hasil Uji-F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	576.738	2	288.369	14.332	.000[a]
	Residual	543.248	27	20.120		
	Total	1119.986	29			

a.Predictors: (Constant), X2, X1

b. Depent Variable: Y

Nilai F_{hitung} sebesar 14,332 dengan nilai signifikan 0,000, karena sig < 0.05 ini berarti H_0 ditolak Ha diterima. Asumsinya bila terjadi penolakan H_0 maka dapat diartikan sebagai adanya pengaruh signifikan dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 23.0, diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut

Tabel Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718[a]	.515	.479	4.485566953

a.Predictions: (Constant), X2, X1

Berdasarkan Tabel didapat nilai koefisien determinan R2 sebesar 0,515. Hal ini berarti besarnya pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 51,5% sementara sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi dan kapasitas SDM, rekonsiliasi dan lain-lain.

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung dengan cara mengalikan nilai koefisien *beta* dengan *zero order*. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Publik (X_1) : 0,425 x 0,677 x 100% = 28,8%
b. Transparansi (X_2) : 0,347 x 0,655 x 100% = 22,7%

Berdasarkan hasil penghitungan koefisien determinasi secara parsial, maka dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas publik memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan transparansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dari hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas publik padaPemerintah Daerah Kota Bandung dapat dikatakan sudah sangat akuntabel. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pencapaian skor dari komponen-komponen akuntabilitas publik yang menghasilkan skor di atas rata-rata. Kelemahan pada akuntabilitas publik yang masih ditemukan diantaranya adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi masih lemah serta ketentuan untuk membuat dan mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu masih kurang. (2) Transparansi pada pemerintah daerah Kota Bandung dapat dikatakan sudah sangat transparan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pencapaian skor dari komponen-komponen transparansi yang sebagian besar menghasilkan skor di atas rata-rata. Kelemahan yang masih ditemukan diantaranya adalah akses atas informasi masih kurang mudah bagi publik serta dalam penyajian laporan keuangan masih kurang memadai dan jelas. (3) Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kota Bandung dapat dikatakan sudah sangat berkualitas. Hal ini ditunjukkan oleh respon positif dari mayoritas responden atas karakteristik kuantitatif dari laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kelemahan yang masih ditemukan diantaranya adalah kurang memiliki manfaat umpan balik serta penyajian laporan keuangan yang sering tidak tepat waktu. (4) Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 28,8%. Akuntabilitas publik yang baik akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah (5) Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 22,7%. Meningkatnya transparansi akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. (6) Akuntabilitas publik dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 51,5% sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi dan kapasitas SDM, rekonsiliasi dan lain-lain. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya meneliti pengaruh variabel lain Terhadap kualitas laporan keuangan yang tidak diteliti dalam penelitian ini serta memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Wulandari, S. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)*. UNHAS.

Darwanis, Yusniyar, & Syukriy Abdullah. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Unsyiah.

Lukito, & Penny Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Nordiawan, & Deddi. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi, & Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Rachmawaty, & Dinie. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Widyatama*.

Sukmaningrum, & Tantriani. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Undip.

Dokumen :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ketentuan

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005

Undang-Undang Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003

Undang-Undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004